

Pentingnya Pemahaman Sistem Pengendalian Internal dan Bahaya Fraud di  
Pemerintah Desa Duwet Krajan, Kabupaten Malang

**Tomy Rizky Izzalqurny<sup>1\*</sup>, Fera Pebriyanti<sup>2</sup>, Gusti B'Tari Artichah<sup>3</sup>, Intan Dilla Sabilah<sup>4</sup>,  
Sayyid Achmad Abdillah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Akuntansi, Universitas Negeri Malang

\*Email: [tomyrizky.izzalqurny.fe@um.ac.id](mailto:tomyrizky.izzalqurny.fe@um.ac.id)

---

**ABSTRACT**

*Village governments are required to implement good government governance. One of the main pillars is accountability in village financial management by reporting village budgets. Through village budget reporting, it is hoped that the tendency of fraud can be avoided. Fraud occurs due to several factors including: apparatus competence, internal control system, morality, organizational culture. The purpose of socialization is to create good village governance and to know the dangers of fraud. The socialization activity was carried out by the service group on January 6 and 12, 2022 which was attended by village apparatus at the Duwet Krajan Village Hall and the Village Head's house. This community service activity in the form of socialization uses several stages of the process to overcome existing problems. The stages carried out are planning, implementation, and evaluation. With this socialization, village apparatus can understand the internal control system to implement in order to achieve good village government governance and prevent fraud.*

**Keywords:** Internal Control System; Fraud; Village Government; Village Apparatus

**ABSTRAK**

*Salah satu pilar utama good government governance pada pemerintahan desa adalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa melalui pelaporan anggaran desa. Pelaporan anggaran desa diharapkan dapat menghindari kecenderungan fraud. Faktor terjadinya fraud diantaranya: kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, moralitas, budaya organisasi. Tujuan sosialisasi adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan mengetahui bahaya fraud. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh kelompok pengabdian pada 06 dan 12 Januari 2022 yang dihadiri oleh perangkat desa di Balai Desa Duwet Krajan dan rumah Kepala Desa. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi ini menggunakan beberapa tahapan proses untuk mengatasi masalah yang ada. Adapun tahapan yang dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan diadakannya sosialisasi ini, perangkat desa dapat memahami sistem pengendalian internal untuk mengimplementasikan guna mencapai tata kelola pemerintah desa yang baik dan mencegah terjadinya kecurangan (fraud).*

**Kata Kunci:** Sistem Pengendalian Internal, Fraud, Pemerintah Desa, Perangkat Desa

---

**PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern menetapkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses integral dari kegiatan pengurus dan seluruh anggota secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan pemerintah. organisasi secara efektif dan efisien, melindungi kekayaan negara, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan keandalan pelaporan keuangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diawasi oleh inspektorat dan diterapkan oleh organisasi pemerintahan di level pusat maupun daerah (Puspa

& Prasetyo, 2020).

Penerapan good government governance oleh pemerintah desa adalah suatu keharusan. Pilar utamanya yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Mattoasi et al. (2021) Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua aset dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal (perusahaan). Akuntabilitas mendorong pejabat untuk bertindak sesuai dengan amanatnya Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 71 Tahun 2010 tentang Prinsip Akuntansi Pemerintahan menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan hubungannya dengan akuntabilitas (Pamungkas dan Rosyanfikri, 2021). Tujuan utama dari laporan keuangan adalah akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui fakta yang dinyatakan secara terbuka (Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pada pasal 70 (1) menyatakan bahwa Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui perantara Camat laporan realisasi APBD, yang meliputi laporan realisasi kegiatan, realisasi APB Desa, dan Catatan Pelaporan Keuangan Semua laporan diumumkan kepada publik melalui media berita (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015). Fraud adalah perilaku melawan hukum oleh individu ataupun kelompok secara sengaja atau tidak untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti harta benda, uang, atau lainnya sehingga merugikan pihak lain (Fitriyah dan Munari, 2021). Beberapa terjadinya fraud seperti budaya organisasi, sistem pengendalian intern dan kompetensi. Kompetensi aparatur pemerintah dalam penerapan sistem pengendalian intern berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan guna mencegah terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian intern pemerintah desa merupakan salah satu mekanisme pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian intern pemerintah desa dilaksanakan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab, pemberian wewenang kepada pihak yang berwenang, pencantuman alat bukti untuk mendukung transaksi, pemeriksaan fisik aset, serta pencatatan dan pemonitorean kegiatan operasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

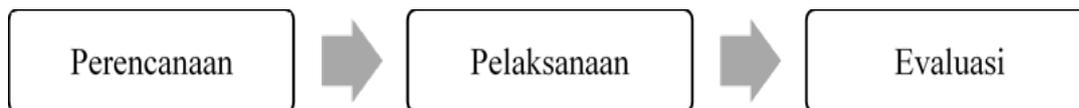
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan keyakinan bagi tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan baik didukung oleh kompetensi aparatur desa. Kemampuan aparatur di Desa Duwet Krajan dalam mengelola keuangan desa terbatas, karena sebagian besar aparatur desa berpendidikan SMA sederajat serta jarang diadakan sosialisasi, atau pelatihan lainnya tentang model pengelolaan keuangan desa dan sosialisasi terkait bahaya fraud. Selain itu, di pemerintah desa Duwet Krajan terkadang terjadi tumpang tindih tugas ketika ada tugas mendadak di luar yang mengharuskan perangkat desa yang sedang bertugas pada bagian pelayanan di Balai Desa digantikan oleh perangkat desa lainnya agar pelayanan tetap berjalan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Ratna et al. (2021) adanya sistem pengendalian internal dapat mencegah dan mendeteksi secara dini atas kesalahan dan ketidaksesuaian. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Maya Widyana Dewi et al. (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi SPIP terhadap pengelolaan dana desa kepada para pengelola dana desa di daerah otonomi penting untuk dilakukan agar dapat mengarahkan pada pelaporan yang akuntabel. Siswadi Sululing (2018) melakukan penelitian dengan hasil yang menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi sistem pengendalian internal pemerintah desa, para aparatur desa sudah dapat membuat perencanaan program dan kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, dapat melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, dapat melakukan penatausahaan dengan melakukan pencatatan akuntansi terhadap transaksi keuangan desa, sehingga dapat mempertanggungjawabkannya serta dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa. Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diadakannya sosialisasi sistem pengendalian internal dan bahaya fraud guna menambah wawasan aparat desa dalam mengelola pemerintah desa dengan baik. Pengendalian internal merupakan dasar kebijakan serta prosedur guna meminimalisir terjadinya risiko, mengantisipasi ketidaksesuaian di lingkup pemerintahan, dan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang tertib dan teratur.

## METODE

Beberapa program kerja telah disiapkan sesuai dengan tema kelompok setelah mengetahui kondisi dan berbagai masalah yang ada di desa dan melakukan analisis yang dibutuhkan. Metode pendekatan ini telah melalui survey lapangan dan kunjungan ke berbagai elemen masyarakat seperti aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa.

Tempat pelaksanaan program kerja sosialisasi Fraud & SPI berada di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang tepatnya di rumah Kepala Desa. Waktu pelaksanaan program kerja ini adalah pada tanggal 06 dan 12 Januari 2021 yang dimulai pukul 09.30 WIB. Sasaran utama dari program kerja ini adalah perangkat desa Duwet Krajan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan beberapa tahapan proses untuk mengatasi masalah yang ada. Adapun tahapan yang dilakukan dalam program ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 1.** Alur Tahap Persiapan dan perencanaan

- **Perencanaan**

Tahap perencanaan kegiatan pengabdian ini yaitu diawali dengan diskusi mengenai materi apa saja yang akan disajikan kepada perangkat desa. Setelah itu, tim pengabdian MBKM Membangun Desa menyiapkan materi sebagai bahan sosialisasi dengan perangkat desa.

- **Pelaksanaan**

Kegiatan sosialisasi tentang Fraud & SPI dilaksanakan pada tanggal 06 dan 12 Januari 2022. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Bapak Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. sebagai pemateri dan penanggung jawab kegiatan sebanyak 4 anggota bersama dengan perangkat desa Duwet Krajan yang meliputi sekretaris desa, kasi pelayanan, dan bendahara desa. Sosialisasi berjalan dengan lancar.

- **Evaluasi**

Kegiatan evaluasi, adalah tahap terakhir yang dilakukan dalam program kerja ini. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan sendiri oleh Tim pengabdian MBKM Membangun Desa untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan telah tercapai atau belum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi bahaya fraud dan sistem pengendalian internal ini telah dilaksanakan dan berjalan lancar sebesar 85% meski dihadiri sedikit perangkat desa dikarenakan bersamaan dengan agenda rapat dan sebagainya. Tahapan awal sebelum dilaksanakannya kegiatan ini, kelompok pengabdian melakukan perencanaan dengan mengidentifikasi apakah telah dilakukan dengan baik terkait pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi terkait pencegahan fraud atas anggaran keuangan desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa kepada seluruh aparat desa dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparat desa dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang bebas dari fraud/korupsi. Kegiatan tersebut diadakan pada hari Kamis, 06 Januari 2022 dan 12 Januari 2022 yang bertempat di rumah Kepala Desa dan diikuti oleh 11 peserta dari perangkat desa dan 13 anggota kelompok pengabdian dengan Bapak Tomy Rizky Izzalqurny, S.E., M.S.A. (Dosen Akuntansi FEB Universitas Negeri Malang) sebagai pemateri.



**Gambar 2** Sosialisasi Bahaya Fraud dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa

Melihat pada gambar 3.1. bapak Tomy menyampaikan terkait kemungkinan timbulnya masalah dalam pengelolaan keuangan desa disebabkan oleh regulasi dan petunjuk teknis dalam pengelolaan anggaran desa yang tidak lengkap, terdapat tumpang tindih wewenang, serta hanya berdasarkan pada aspek pemerataan. kemungkinan masalah yang ada dalam Sumber Daya Manusia berupa kolusi dengan pemasok serta mark-up harga guna memperkaya diri sendiri termasuk kepentingan politik tertentu.



**Gambar 3** Penyampaian Materi oleh Pemateri

Melihat pada gambar 3.2 pemateri menyampaikan terkait upaya pencegahan fraud dengan membangun Sistem Pengendalian Internal di Desa dengan baik diantaranya :

*Soft Control* dapat dilakukan dengan:

- Menegakkan integritas serta etika aparat desa dan staf lainnya
- Menerapkan kepemimpinan yang efektif di desa
- Menerapkan pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa

*Hard Control* meliputi :

- Adanya peraturan serta kebijakan
- Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
- Pemakaian aplikasi berbasis sistem yang dapat membantu desa untuk melaksanakan akuntabilitas, mentaati peraturan undang-undang, dan keamanan dalam pencatatan aset milik desa.

Sesi penyampaian materi telah selesai, kemudian diadakan evaluasi melalui sesi diskusi oleh perangkat desa kepada pemateri terkait pencegahan fraud dan sistem pengendalian internal pemerintah desa namun masih belum ada pertanyaan terkait hal itu seperti pada gambar 3.2.



**Gambar 4** Sesi Tanya Jawab oleh Perangkat Desa kepada Pemateri

## **SIMPULAN**

Pentingnya pemahaman mengenai sistem pengendalian internal pada pemerintah desa sangat ditekankan agar tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih baik. Segenap perangkat desa diharapkan memahami dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal dalam melakukan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas, setiap posisi atau jabatan yang ditempati oleh perangkat desa juga tidak bisa terlepas dari peluang fraud. Setiap perangkat desa harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terhadap sistem kerja pemerintahan desa untuk dapat menghindari kemungkinan fraud. Jika sistem pengendalian internal pemerintah desa dijalankan dengan baik dan perangkat desa tidak melakukan kecurangan, maka sistem tata kelola pemerintahan desa akan berjalan dengan baik. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat desa.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Dewi, M.W. (2019). Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tasikmadu Karanganyar. *Jurnal Budimas. 1*(1). 33-37.
- Fitriyah, A., Munari, (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi Di Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Kedamean. *Senapan. 1*(1), 323-336.
- Indonesia. Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan. (2015). *Kawal Keuangan Desa. Majalah Warta Pengawasan., XXII*, 4-7.
- Lestari, N. L. P. R. W., Juniariani, N. M. R., & Pratama, I. G. S. (2021). Program Kemitraan Masyarakat pada Kelompok Nelayan Samanjaya. *Krida Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat. 1*(3). 100-108.
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review, 2*(2), 100-109.
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani , 8*(2), 36-45.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 20*(2), 281-298.
- Sululing, S. (2018). Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal MasyarakatMerdeka. 1*( 1).31-38.